

PERHITUNGAN BIAYA SATUAN UNIT (*UNIT COST*) SPP BULANAN DI MI DARUL ULUM BRENGKOK BRONDONG PACIRAN LAMONGAN

Ahmad Saudin

Mahasiswa Pascasarjana UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, Indonesia

Email: ahmadsaudin12@gmail.com

Dikirim: 12 Februari 2019 | Direvisi: 15 April 2019 | Dipublikasikan: 31 Juli 2019

Abstraksi: Manajemen pendidikan merupakan sebuah esensi bagi keberlangsungan kehidupan sebuah lembaga pendidikan. Salah satu hal terpenting dalam menjalankan manajemen organisasi pendidikan adalah bidang keuangan. Pendidik akan senantiasa semangat dan jarang absen mengajar ketika kehidupannya terjamin dan sejahtera secara finansial. Oleh sebab itu, keuangan merupakan pondasi dasar dalam organisasi di bidang pendidikan. Gaji guru diperoleh dari banyak tidaknya jumlah peserta didik. Penentuan biaya satuan setiap peserta didik sudah ditentukan sebelum tahun ajaran baru. Penelitian ini termasuk jenis penelitian deskriptif kualitatif dengan menggunakan data sekunder. Hasil dari penelitian ini menyatakan bahwa pendapatan yang diperoleh MI Ma'arif Darul Ulum Brengkok untuk satu tahun ajaran (2018/2019) adalah sebesar Rp. 568.581.500,- dan pengeluarannya adalah sebesar Rp 565.581.500,- Hal ini menjadikan saldo keuangan pendidikan di MI Ma'arif Darul Ulum Brengkok adalah sebesar Rp. 3.000.000,-. Untuk SPP siswa diberi beban sebesar Rp 35.000,-/siswa. sehingga dapat dilihat bahwa secara keuangan di lembaga ini masih serba minim. Oleh karenanya perlu adanya pemaksimalan lagi dalam pengelolaan manajemen keuangan pendidikannya.

Kata kunci: *Unit cost; pembiayaan; manajemen; pendidikan; Islam.*

Pendahuluan

Sekolah merupakan tempat untuk mendapatkan ilmu pengetahuan, baik untuk siswa maupun untuk guru. Sebab guru yang mengajar sudah pasti belajar, tapi belajar disini diartikan adalah belajar untuk mendidik siswa agar lebih cerdas. Pengalaman yang diperoleh oleh guru inilah yang dinamakan pembelajaran guru.

Dalam proses kegiatan pendidikan yang ada disuatu lembaga pendidikan pastilah dibutuhkan yang namanya pembiayaan. Sebab, diakui atau tidak bahwasanya pendidikan yang maju adalah pendidikan yang berani menggelontorkan banyak uang untuk keberlangsungan pendidikan yang ada pada sebuah lembaga yang pastinya keuangan tersebut sudah diatur dan di rinci terlebih dahulu sebelum digelontorkan. Sebab, diakui atau tidak pendidikan yang baik tentu membutuhkan biaya yang tidak sedikit. Jadi kurang tepat jika ada istilah pendidikan harus murah bahkan gratis.

Anggaran pendidikan di Indonesia setiap tahunnya telah mencanangkan alokasi anggaran pendidikan sebesar minima 20% dari total Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), demikian pula pemerintah daerah setiap tahun menetapkan anggaran untuk pendidikan seperti untuk gaji guru dan gaji tenaga kependidikan lainnya di daerah.¹ Sesuai dengan Undang-Undang

¹ Rida Fironika K., "Pembiayaan Pendidikan Di Indonesia," *Jurnal Ilmiah Pendidikan Dasar UNISSULA* Vol. 02 No. 1 (2015): 44.

Dasar Tahun 1945 yang telah diamandemen, negara Indonesia memberikan amanat kepada pemerintah untuk menetapkan anggaran pendidikan 20 persen dari anggaran belanja negara seperti tertuang pada pasal 31 Ayat 4. Pendidikan diibaratkan sebagai suatu kereta yang ditarik kuda, artinya keberhasilan proses pendidikan merupakan kontribusi dari lintas sektoral yaitu tenaga kerja, industri ekonomi, budaya dan lain sebagainya.²

Dana pendidikan memang besar tapi dilapangan ditemukan banyak permasalahan seperti, kurang sejahteranya guru, sarana dan prasarana yang kurang menunjang dan masih banyak lagi. Hal ini diakibatkan oleh dana bantuan yang telah diberikan oleh pemerintah pusat ternyata tidak bisa mencukupi biaya operasional sekolah dan biaya lain yang diperlukan oleh sekolah, oleh sebab itu kekurangan biaya pendidikan pendidikan juga harus ditanggung oleh pemerintah daerah, orangtua/masyarakat secara proporsional.

Perhitungan biaya pendidikan ini diharapkan dapat membantu memperbaiki kualitas pendidikan di Madrasah Diniyah. Masyarakat dapat memiliki kepercayaan dan keyakinan untuk memotivasi putra-putrinya untuk belajar agama hingga lulus di Madrasah Diniyah. Selain itu juga untuk menambah akses informasi tentang pembiayaan pendidikan dan sistem pembiayaan dan perhitungannya di lembaga pendidikan luar sekolah khususnya studi kasus di Madrasah Diniyah karena dari penelusuran pustaka masih belum banyak penelitian yang mengambil topik analisis biaya pendidikan di Madrasah Diniyah.

Perencanaan biaya pendidikan sering di sebut dengan rencana anggaran pendapatan dan belanja madrasah atau sering disebut RAPBM. Dimana RAPBM ini dibuat sebelum tahun ajaran baru dimulai. RAPBM ini juga disebut oleh beberapa orang dalam instansi dengan sebutan perencanaan satuan unit cost lembaga pendidikan.

Standard unit cost pendidikan (objekbiaya) untuk sekolah atau madrasah sangat diperlukan oleh seluruh pihak-pihak yang terkait di dalamnya, seperti: pemerintah, masyarakat, sekolah itu sendiri yang berinteraksi secara sinergis, saling terkait dan terpadu. Pengelolaan dan pembiayaan untuk sekolah/madrasah swasta dilakukan oleh penegelola sekolah itu sendiri.

Nanang Fattah menyatakan bahwa dalam konsep pendidikan dasar ada dua hal penting yang perlu dikaji atau dianalisis, yaitu biaya pendidikan secara keseluruhan (*total cost*) dan biaya satuan per siswa (*unit cost*). Merupakan ukuran yang menggambarkan seberapa besar biaya yang dialokasikan ke satuan pendidikan secara efektif terserap untuk kepentingan siswa dalam menempuh pendidikan. Karena satuan biaya pendidikan diperoleh dengan memperhitungkan jumlah siswa pada masing-masing satuan pendidikan, maka ukuran biaya satuan dianggap standar dan dapat dibandingkan antara satuan pendidikan yang satu dengan satuan pendidikan yang lainnya.³

Dalam keberlangsungan pendidikan biaya pendidikan terbagi menjadi beberapa macam Biaya Langsung (*direct cost*), Biaya Langsung terdiri dari biaya-biaya yang dikeluarkan untuk keperluan untuk keperluan pelaksanaan pengajaran dan kegiatan-kegiatan belajar siswa berupa pembelian alat-alat pembelajaran, saran belajar, biaya transportasi, gaji guru, baik yang dikeluarkan oleh pemerintah, orang tua maupun siswa sendiri. Sedangkan Biaya Tidak Langsung berupa keuntungan yang hilang (*learning forgone*) dalam bentuk biaya kesempatan yang hilang (*opportunity cost*) yang dibebankan oleh siswa selama belajar.⁴ Agar dapat melaksanakan usaha pokok madrasah secara

² Ibid.

³ Ria Maya Andreti, "Analisis Perhitungan Biaya Satuan (Unit Cost) Dengan Model *Activity Based Costing* (ABC) Di SMK Negeri 1 Wonosari" (Skripsi, Universitas Negeri Yogyakarta, 2016), 5.

⁴ Chatrin Tri Handayani and Sukirno, "Analisis Perhitungan Biaya Satuan (Unit Cost) Di Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Yogyakarta," *Jurnal Kajian Pendidikan Akuntansi Indonesia* Vol. 5 No. 1 (2016): 3.

efisien, efektif, produktif dan berkualitas.

Biaya Pendidikan di MI Darul Ulum Brengkok adalah gratis, semua SPP ditanggung oleh dana bantuan operasional sekolah (BOS), sedangkan untuk buku dan kitab semua ditanggung oleh orang tua atau wali murid. Meskipun SPP ditanggung oleh pemerintah. Tapi agar dana yang didapatkan sesuai dengan kebutuhan sekolah agar kesejahteraan guru bisa didapat maka sekolah membuat anggaran dana setiap siswa atau biaya rata-rata yang dikeluarkan oleh siswa dalam waktu sebulan. Analisis efisiensi keuangan di MI Darul Ulum Brengkok dalam pemanfaatan sumber-sumber keuangan dan hasil (*output*) dapat dilakukan dengan cara menganalisis Biaya Satuan (*Unit Cost*) Per Siswa. Biaya Satuan Per Siswa adalah biaya rata-rata per siswa yang dihitung dari total pengeluaran sekolah dibagi seluruh siswa yang ada di sekolah dalam kurun waktu tertentu. Dengan mengetahui besarnya Biaya Satuan Per Siswa menurut jenjang pendidikan berguna untuk menilai berbagai alternatif kebijakan dalam upaya peningkatan mutu pendidikan.⁵

Charles T. Horngren, dkk menyatakan bahwa salah satu cara terbaik untuk memperbaiki sistem perhitungan biaya adalah dengan menerapkan sistem perhitungan biaya berdasarkan aktivitas atau *Activity Based Costing (ABC)*. Sistem ABC memperbaiki sistem kalkulasi biaya dengan mengidentifikasi aktivitas individual sebagai objek biaya dasar (fundamental). Perbedaan utama penghitungan biaya antara akuntansi biaya tradisional dengan ABC adalah jumlah *cost driver* (pemicu biaya) yang digunakan dalam metode ABC lebih banyak dibandingkan dalam sistem akuntansi biaya tradisional⁶ serta masih banyak lagi teknik lain yang bisa digunakan dalam perhitungan satuan pembiayaan.

Meski ada banyak cara dalam penentuan *Unit Cost* tapi dalam penelitian ini hanya berfokus pada perhitungan biaya satuannya saja. Oleh sebab itu dari penjabaran di atas maka penulisan artikel penelitian ini mengambil judul “Penentuan Perhitungan Biaya Satuan (*Unit Cost*) SPP Bulanan di MI Darul Ulum Brengkok tahun ajaran 2018/2019”.

Profil MI Maarif NU Darul Ulum Brengkok Brondong Lamongan

Desa Brengkok terletak disebelah barat Kecamatan Brondong Kabupaten Lamongan 17 Km arah timur kota Tuban telah mempunyai kenangan sejarah dalam dinamika pendidikan. Sebenarnya telah lama timbul keinginan dikalangan tokoh masyarakat desa Brengkok sendiri untuk mendirikan Madrasah, mengingat kebutuhan masyarakat terhadap dunia pendidikan, walaupun ada jauh diluar daerah bahkan sampai luar kabupaten seperti ke Tuban, selain itu juga banyak anak yang tidak melanjutkan pendidikan setelah TK, maka pada tahun 1988 Bapak K. Ahmad Abu dan beberapa toko NU di Brengkok berinisiatif mendirikan lembaga pendidikan berupa Madrasah Ibtidaiyah, pada awal pendidikan selama 1 tahun proses belajar mengajar gedung masih mengalami pembangunan.

Pada tahun 1985, pengurus NU ranting Brengkok membangun gedung MI dengan dana swadaya dari masyarakat dengan sederhana dan bertahap yang lokasinya disebelah timur masjid Jami' Al Huda, 1 tahun kemudian gedung direnovasi mulai dari lantai, dinding dan genting sehingga siswa belajar sudah bisa tenang dan nyaman. Pada tahun 1993 nomor Mm.21/06.00/PP.03.2/124/1993 dengan status terdaftar. Tahun 2018 mendapat piagam Akreditasi “A”.

⁵ Ibid., 4.

⁶ Maya Andreti, “Analisis Perhitungan Biaya Satuan (*Unit Cost*) Dengan Model *Activity Based Costing (ABC)* Di SMK Negeri 1 Wonosari,” 6.

Adapun Kepala Madrasah yang memimpin yaitu: Bapak Kyai Muhammad Asyhari (1980-1986 dari Sendangharjo); Bapak Moh. Mahfudz Masykur (1986 – 1994 Almarhum dari Pambon); Bapak Sujudi, S.PdI (1994 – 2011 dari Brengkok); Bapak Ahmad Junaidi, S.PdI (2011 – Sampai sekarang dari Brengkok).

Kajian Pustaka

Konsep Pembiayaan Pendidikan

Sesuatu yang berhubungan dengan perencanaan, perolehan, pengalokasian dan pengelolaan biaya pendidikan merupakan pembiayaan atau pendanaan pendidikan (*educational finance*). Selanjutnya biaya pendidikan merupakan salah satu komponen masukan instrumental (*instrumental input*) dalam penyelenggaraan pendidikan di sekolah.⁷ Biaya (*Cost*) yaitu semua jenis pengeluaran yang berkenaan dengan penyelenggaraan pendidikan, baik dalam bentuk uang maupun barang dan tenaga (yang dapat dihargakan dengan uang) misalnya : iuran siswa, sarana fisik dan buku.⁸ Dalam konsep pembiayaan pendidikan dasar dan menengah, ada dua hal penting yang perlu dikaji atau dianalisis, yaitu pembiayaan pendidikan dari pemerintah, pemerintah daerah dan masyarakat pada satuan pendidikan. Selanjutnya pembiayaan satuan pendidikan merupakan biaya secara keseluruhan (*total cost*) dan biaya satuan per siswa (*unit cost*), dalam kaitannya dengan pemenuhan Standar Nasional Pendidikan.⁹

Menurut Pena dan Ndiaye, unit cost adalah hasil dari total biaya dibagi jumlah unit pelayanan. Agar perbandingan dapat dilakukan, ukuran efisiensi harus sebagai unit cost. Biaya satuan adalah biaya yang diperlukan atau yang dikeluarkan untuk menghasilkan satu satuan produk (barang atau jasa). Dalam analisis biaya rumah sakit untuk perhitungan biaya satuan perlu diketahui secara rinci jenis-jenis produk/jenis pelayanan yang dihasilkan oleh unit-unit produksi.¹⁰ Nanang Fattah menyatakan bahwa dalam konsep pendidikan dasar ada dua hal penting yang perlu dikaji atau dianalisis, yaitu biaya pendidikan secara keseluruhan (*total cost*) dan biaya satuan per siswa (*unit cost*).¹¹

Biaya satuan di tingkat sekolah merupakan agregat biaya pendidikan tingkat sekolah, baik yang bersumber dari pemerintah, orang tua, dan masyarakat yang dikeluarkan untuk penyelenggaraan pendidikan dalam satu tahun pelajaran. Biaya satuan per siswa (*unit cost*) merupakan ukuran yang menggambarkan seberapa besar biaya yang dialokasikan ke satuan pendidikan secara efektif terserap untuk kepentingan siswa dalam menempuh pendidikan. Karena satuan biaya pendidikan diperoleh dengan memperhitungkan jumlah siswa pada masing masing satuan pendidikan, maka ukuran biaya satuan dianggap standar dan dapat dibandingkan antara satuan pendidikan yang satu dengan satuan pendidikan yang lainnya.¹²

⁷ Ni Luh Kadek Supartini, "Analisis Satuan Biaya Pendidikan Di SMA Negeri 1 Sukawati Tahun Ajaran 2010/2011," *Jurnal Administrasi Pendidikan Indonesia* Vol. 3 No. 2 (2012): 5.

⁸ Ibid.

⁹ Ibid.

¹⁰ Yulianisel, "Perhitungan Unit Cost Tindakan Bedah Appendiktomi Di Kamar Operasi Rsd Madani Provinsi Sulawesi Tengah," *e-Jurnal Katalogis* Volume 3 Nomor 5 (May 2015): 173.

¹¹ Ibid.

¹² Maya Andreti, "Analisis Perhitungan Biaya Satuan (Unit Cost) Dengan Model Activity Based Costing (ABC) Di SMK Negeri 1 Wonosari," 3.

Sumber Biaya Pendidikan

Sumber pembiayaan merupakan ketersediaan sejumlah uang atau barang dan jasa yang dinyatakan dalam bentuk uang bagi penyelenggaraan pendidikan. Di dalam UU No. 20 Tahun 2003 Pasal 46 ayat 1 dinyatakan bahwa pendanaan pendidikan menjadi tanggung jawab bersama antara pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat.¹³ Hal ini juga disebutkan oleh Sulistiyorini bahwa secara garis besar sumber keuangan pendidikan dapat dikelompokkan menjadi tiga yaitu: (1) Pemerintah; Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah maupun keduanya (2) Orang Tua Siswa (peserta didik) (3) Masyarakat, baik yang sifatnya mengikat maupun tidak mengikat.¹⁴

Sedangkan sumber pembiayaan pendidikan (penerimaan) dilihat dari tataran makro atau nasional berasal dari:

1. Pendapatan negara dari sektor pajak yang beragam jenisnya;
2. Pendapatan dari sektor non pajak seperti hasil pemanfaatan sumber daya alam dan produksinasional lainnya seperti hasil, hasil kelautan, gas dan non migas;
3. Keuntungan dari ekspor barang dan jasa;
4. Usaha-usaha negara lainnya termasuk hasil investasi saham pada perusahaan negara, BUMN, BUMD, industri, pariwisata; serta
5. bantuan dalam bentuk hibah (*grant*) dan pinjaman luar negeri dari lembaga keuangan internasional seperti UNESCO, UNICEF, Bank Dunia seperti Asian Development Bank (ADB), Internasional Moneter Fun (IMF), International Development Bank (IDB), maupun pemerintah luar negeri melalui kerjasama multilateral dan bilateral. Alokasi dana untuk setiap sektor pembangunan, termasuk sektor pendidikan yang dituangkan dalam Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN).¹⁵

Sistem Pembiayaan Pendidikan

Biaya pendidikan merupakan komponen masukan instrumental (*instrumental input*) yang sangat penting dalam menyiapkan SDM melalui penyelenggaraan pendidikan di sekolah.¹⁶ Pembiayaan pendidikan tidak lepas dari persoalan “ekonomi pendidikan”. bahkan secara tegas Mark Blaug mengemukakan bahwa “*the economic of education is a branch of economic*”. Jadi, dapat dikatakan menurut pandangan ini bahwa pada dasarnya pembiayaan pendidikan merupakan bagian atau cabang dari ilmu ekonomi. Sebab, pembiayaan pendidikan menurut Blaug sebagai *the costing and financing of school place*, yaitu bagian dari permasalahan ekonomi pendidikan. pada bagian lain, Mark Blaug mengemukakan “*the economic of education is only part the story of any educational issue*”. Menurut pandangan ini mengkaji ilmu ekonomi pendidikan maupun pembiayaan pendidikan hanya merupakan salah satu isu penting dalam dunia pendidikan.¹⁷

Sistem pembiayaan pendidikan merupakan proses dimana pendapatan dan sumber daya tersedia digunakan untuk memformulasikan dan mengoperasionalkan sekolah. Sistem pembiayaan pendidikan sangat bervariasi tergantung pada kondisi masing-masing negara seperti kondisi geografis, tingkat pendidikan, kondisi politik pendidikan, hukum pendidikan, ekonomi pendidikan,

¹³ Undang-Undang RI No. 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional Dan Penjelasannya (Yogyakarta: Media Wacana Press, 2003).

¹⁴ Sulistiyorini dalam Nur Komariah, “Konsep Manajemen Keuangan Pendidikan,” *Jurnal al-Afkar* Vol. 6 Nomor 1 (April 2018): 74.

¹⁵ Luh Kadek Supartini, “Analisis Satuan Biaya Pendidikan Di SMA Negeri 1 Sukawati Tahun Ajaran 2010/2011,” 5.

¹⁶ Maman Rusmana, “Sistem Pembiayaan Pendidikan Ditinjau Dari Efektivitas Dan Efisiensi Penyelenggaraan Pendidikan Pada Pemerintah Kabupaten Garut,” *Jurnal Administrasi Pendidikan* Vol. 7 No. 1 (2018): 4.

¹⁷ Mulyono, *Konsep Pembiayaan Pendidikan* (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2010), 76.

program pembiayaan pemerintah dan administrasi sekolah. Sementara itu terdapat beberapa faktor yang perlu diperhatikan untuk mengetahui sesuai tidaknya sistem dengan kondisi negara.¹⁸

Untuk mengetahui apakah sistem tersebut memuaskan, dapat dilakukan dengan cara-cara berikut:

1. Menghitung berbagai proporsi dari kelompok usia, jenis kelamin, tingkat buta huruf; dan
2. Distribusi alokasi sumber daya pendidikan secara efisien dan adil sebagai kewajiban pemerintah pusat mensubsidi sektor pendidikan dibandingkan dengan sektor lainnya.¹⁹

Pemahaman tentang konsep pembiayaan pendidikan perlu diketahui pengertian dari tujuh konsep penting terkait dengan pembiayaan yang meliputi:

1. Objek biaya;
2. Informasi manajemen biaya;
3. Pembiayaan (*financing*);
4. Keuangan (*finance*)
5. Anggaran (*budget*);
6. Biaya (*cost*);
7. Pemicu biaya (*cost driver*)²⁰

Biaya Pendidikan di Sekolah

Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 dalam pasal 3, biaya pendidikan meliputi:

1. Biaya satuan pendidikan;
2. Biaya penyelenggaraan dan/atau pengelolaan pendidikan; dan
3. Biaya pribadi peserta didik

Di tingkat satuan pendidikan yaitu sekolah, biaya dapat diklasifikasikan ke dalam biaya investasi dan biaya operasional. Biaya investasi satuan pendidikan atau sekolah meliputi biaya penyediaan sarana dan prasarana, pengembangan sumber daya manusia, dan modal kerja tetap, seperti lahan berupa tanah, dan biaya investasi selain lahan merupakan barang dan alat yang dipakai lebih dari sekali dan umurnya lebih dari setahun seperti gedung, ruang kelas belajar, laboratorium, peralatan kantor, sarana pembelajaran, peralatan.²¹

Biaya yang dikeluarkan untuk membeli tanah memang merupakan unsur biaya investasi, tetapi harga tanah tidak diperhitungkan dalam biaya pendidikan, karena tanah dianggap tidak mengalami penyusutan. Tetapi kalau menyewa tanah, maka sewanya tiap tahun diperhitungkan sebagai biaya pendidikan. Sementara untuk biaya bangunan, taman, fasilitas olahraga, peralatan dan perlengkapan, perabot dan mebel, serta buku teks, buku sumber bacaan, dihitung nilai taksiran penyusutannya tiap tahun sebagai komponen biaya penyusutan investasi.²²

Menurut Jusuf, Biaya operasi atau biaya operasional adalah biaya-biaya yang tidak berhubungan langsung dengan produk perusahaan tetapi berkaitan dengan aktivitas operasi perusahaan sehari-hari.²³ Supriyono, mengatakan bahwa biaya operasi dikelompokkan menjadi 2 golongan dan dapat diartikan sebagai berikut : (1) Biaya langsung (*direct cost*) adalah biaya yang terjadi

¹⁸ Luh Kadek Supartini, "Analisis Satuan Biaya Pendidikan Di SMA Negeri 1 Sukawati Tahun Ajaran 2010/2011," 6.

¹⁹ Ibid.

²⁰ In Sunarti dalam Himyar Fasrizal, "Manajemen Pembiayaan Sekolah Dalam Meningkatkan Mutu Sekolah," *Jurnal al-Fikrah* Vo. 2 No. 1 (2014): 13.

²¹ Luh Kadek Supartini, "Analisis Satuan Biaya Pendidikan Di SMA Negeri 1 Sukawati Tahun Ajaran 2010/2011," 6.

²² Ibid.

²³ M. Findo Riatama, "Analisis Efisiensi Biaya Operasional Terhadap Profitabilitas Pada Perusahaan Sektor Makanan Dan Minuman Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia (BEI) Periode 2011-2014" (Skripsi-, Universitas Lampung, 2017), 2.

atau manfaatnya dapat diidentifikasi kepada objek atau pusat biaya tertentu. (2) Biaya tidak langsung (*indirect cost*) adalah biaya yang terjadi atau manfaatnya tidak dapat diidentifikasi pada objek atau pusat biaya tertentu, atau biaya yang manfaatnya dinikmati oleh beberapa objek atau pusat biaya.²⁴

Biaya operasional dapat dipilah menjadi biaya operasional personal dan biaya operasional bukan personal. Biaya operasional personal meliputi seluruh pengeluaran sekolah yang digunakan untuk kesejahteraan personal atau sumber daya manusia (SDM) dan pengembangan personal (SDM) sekolah. Kesejahteraan personal mencakup gaji, tunjangan, kesejahteraan, transportasi termasuk perjalanan dinas, seragam, kelebihan jam mengajar atau kerja, tunjangan hari raya, dan sebagainya. Adapun personal (SDM) sekolah tersebut adalah: kepala sekolah, wakil kepala sekolah, guru tetap pegawai negeri sipil (PNS), guru honorer, guru diperbantukan, guru tetap yayasan, pegawai tata usaha (TU), pesuruh sekolah, satpam, tenaga laboratorium atau bengkel, pegawai perpustakaan, dan pengurus komite sekolah.²⁵

Biaya satuan pendidikan operasional bukan personal meliputi seluruh pengeluaran sekolah selain yang dimanfaatkan untuk keperluan kesejahteraan guru dan staf di sekolah. Komponen biaya ini mencakup biaya sebagai berikut:

1. Biaya Alat Tulis Sekolah meliputi alat tulis kantor dan alat PBM.
2. Buku-buku meliputi buku pegangan guru, buku untuk siswa dan perpustakaan
3. Biaya alat dan bahan habis pakai terdiri dari bahan praktek, alat-alat praktek, LKS (Lembar Kerja Siswa), alat kebersihan, alat listrik, dan kebutuhan rumah tangga sekolah.
4. Biaya daya dan jasa meliputi listrik, telepon, air, internet dan gas
5. Biaya perbaikan ringan dan pemeliharaan untuk gedung, alat / utilitas dan perabot.
6. Biaya pembinaan siswa terdiri dari pramuka, kegiatan OSIS, masa orientasi siswa (MOS), kegiatan olimpiade, lomba-lomba, LPIP (Lomba Penelitian Ilmiah Pelajar)/LKIR (Lomba Karya Ilmiah Remaja), PIB (Pembinaan Intensif Belajar)/Bimbingan Belajar (BIMBEL), kegiatan keagamaan, peringatan Perayaan Hari Besar Keagamaan (PHBK), Perayaan Hari Besar Nasional (PHBN), Usaha Kesehatan Sekolah (UKS), bimbingan dan penyuluhan/ bimbingan karier/bursa kerja khusus, olahraga, kesenian dan palang merah remaja (PMR).
7. Biaya pembinaan, pengawasan, pemantauan dan pelaporan, dan
8. Biaya rapat yaitu pendukung perlengkapan rapat dan konsumsi serta
9. Biaya operasional komite sekolah.

Metode Penelitian

Dalam penelitian ini, metode yang digunakan adalah metode deskriptif kualitatif dengan menggunakan data sekunder. Data sekunder diperoleh dari dokumen-dokumen mengenai biaya²⁶ yang ada di sekolah. Penelitian kualitatif sendiri merupakan suatu pendekatan dalam melakukan penelitian yang berorientasi pada fenomena atau gejala yang bersifat alami. Mengingat orientasinya demikian, maka sifatnya mendasar dan naturalistik atau bersifat kealamian serta tidak bisa dilakukan

²⁴ Ibid.

²⁵ Luh Kadek Supartini, "Analisis Satuan Biaya Pendidikan Di SMA Negeri 1 Sukawati Tahun Ajaran 2010/2011," 7.

²⁶ Lukman Hilfi et al., "Perbedaan Perhitungan Unit Cost Dengan Menggunakan Metode Activity Based Costing (ABC) Dan Metode Double Distribution (DD) Untuk Pasien Tb Paru Kategori 2 Di Instalasi Rawat Jalan Dan Rawat Inap Rumah Sakit Paru," *JSK* Volume 1 Nomor. 2 (Tahun 2015): 65.

di laboratorium, melainkan dilapangan. Oleh sebab itu, penelitian semacam ini sering disebut dengan, *naturalistic inquiri*, atau *field study*.²⁷

Temuan dan Pembahasan

Dari hasil data yang didapatkan peneliti, penentuan *unit cost* ditetapkan sebelum tahun ajaran baru dimulai, berdasarkan tanya jawab saat bertemu dengan bendahara. Beliau menjelaskan bahwa awal penentuan *unit cost* dihitung berdasarkan banyaknya siswa yang akan masuk, siswa yang sudah keluar serta siswa banyaknya siswa yang masih bertahan(sekolah). Untuk data siswa yang mau masuk, datanya di dapatkan berdasarkan banyak siswa yang keluar dari taman kana-kanak, sebab dalam satu lembaga terdapat Taman Kanak-Kanak (TK), Madrasah Ibtidaiyah (MI), Madrasah Tsanawiyah (MTs.) serta SMA. Kemudian, saat mau keluar para guru untuk memastikan agar datanya valid maka guru masuk kedalam rumah rumah siswa. oleh sebab itu penentuan unit cost sudah bisa dirancang dengan tingkat validitas data sebesar 98%.

Berdasarkan data yang diperoleh total pendapatan selama satu tahun adalah sebesar 568.581.500,- Dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 1
Rincian Pendapatan Sekolah Pertahun

No.	Sumber Pendapatan	Vol.	Satuan	Harga Satuan	Jumlah
1	Saldo			53.531.500,-	53.531.500,-
2	Dana Midle Semester				
	a. Kelas 1-6 (235 X 2) X 35.000,-	250	Siswa	80.000,-	20.000.000,-
3	Dana Semester				
	a. Kelas 1-6 ((235 X 2) X 45.000,- (2 Smt)	250	Siswa	90.000,-	22.500.000,-
4	Biaya Foto Kelas 6	41	Siswa	50.000,-	2.050.000,-
5	Dana Ujian Akhir	41	Siswa	850.000,-	34.850.000,-
6	Dana Perpindahan Kelas 1-5	210	Siswa	40.000,-	200.000.000,-
7	Bos Reguler	250	1 tahun	800.000,-	3.200.000,-
8	Dana BSM (8 Siswa X 2 Smt	8	Siswa	400.000,-	3.200.000,-
9	Dana Infaq		Siswa	50.000,-	12.500.000,-
10	Perolehan Tabungan 5%	250	Siswa	5%	17.000.000,-
11	SHU Koperasi	1	Tahun	10.000.000,-	10.000.000,-
12	Pemasukan Drumband 1 Tahun	1	Tahun	0	0
13	TPP	10	Guru	16.000.000,-	160.000.000,-
14	Pengadaan Sampul Raport	45	Siswa	40.000,-	1.800.000,-
15	Bimbel	250	Siswa	60.000,-	15.000.000,-
16	Anggaran Pramuka	150	Siswa	10.000,-	1.500.000,-
17	Kontribusi PHBN/PHBI	250	Siswa	25.000,-	6.250.000,-
Jumlah total pendapatan					568.581.500,-

Untuk pengeluaran terbagai beberapa bidang yaitu sebagai berikut:

1. Bidang Umum dan Ketatausahaan

Bidang Umum dan Ketatausahaan adalah sebesar Rp. 28,810,000 dengan rincian sebagai berikut:

²⁷ Rudi Susilana, *Modul Pembelajaran Metode Penelitian Kualitatif* (Badung: Jurusan Kurikulum dan Teknologi Pendidikan FIP UPI, 2012), 1.

Tabel 2.
Rincian Keuangan Bidang Umum dan Ketatausahaan

No.	Pos Pengeluaran	Vol.	Satuan	Harga Satuan	Jumlah
1	Penyusunan Program +LPJ	23	Gr	50.000,-	1.150.000,-
2	Penganggaran Rapat Dewan Guru & Pengurus (21 Gr x 15.000,-)	12	Kali	315.000,-	3.780.000,-
3	Raker Kepala	4	Kali	500.000,-	2.000.000,-
4	Modem Spedy Prabayar	14	Bl	225.000,-	3.150.000,-
5	Transportasi				
	a. Ke Brondong	20	Kali	30.000,-	600.000,-
	b. Ke Paciran Dan Sekitarnya	10	Kali	50.000,-	500.000,-
	c. Ke Lamongan	15	Kali	150.000,-	2.250.000,-
	d. Ke Tuban	10	Kali	50.000,-	500.000,-
	e. Ke Surabaya	2	Kali	250.000,-	500.000,-
6	Foto Copy	12	Bl	50.000,-	600.000,-
7	PLN	12	Bl	350.000,-	4.200.000,-
8	Pulsa Hpsekolah	12	Bl	50.000,-	600.000,-
9	Penyempurnaan Administrasi	2	Losen	400.000,-	800.000,-
10	Kapur Sarjana	2	Box	150.000,-	300.000,-
11	Board Markas	144	Bh	5.000,-	720.000,-
12	Resil Board Marker	1	Ltr	160.000,-	160.000,-
13	ATK	1	Thn.	1.000.000,-	1.000.000,-
13	Perawatan Komputer	2	Unit	1.000.000,-	200.000,-
15	Pengadaan Printer	1	Unit	2.000.000,-	200.000,-
16	Bahan Habis Pakai	1		2.000.000,-	200.000,-
Jumlah					28.810.000,-

2. Bidang Kurikulum

Bidang kurikulum dana yang dikeluarkan adalah sebesar Rp. 80.110.000,- dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 3
Rincian Keuangan Bidang Kurikulum

No.	Pos Pengeluaran	Vol.	Satuan	Harga Satuan	Jumlah
1.	<i>Perlengkapan Administrasi Kurikulum</i>				
	a. Pembuatan Absensi Siswa	12	Bk	10.000,-	120.000,-
	b. Jurnal Kelas	12	Bk	20.000,-	240.000,-
	c. Daftar Nilai Dan Absen Siswa/Guru	18	Mpl	25.000,-	450.000,-
	d. DKN	12	Bk	10.000,-	120.000,-
	e. Buku Pegangan Guru	20	Bk	100.000,-	2.000.000,-
	a. Biaya Sampul Raport	45	Siswa	30.000,-	1.350.000,-

2.	<i>Pelaksanaan Midle Semester</i>				
	1. Panitia	2	Smt.	800.000,-	1.600.000,-
	2. FC Soal. (Mid 1 &2)	2	Smt.	1.000.000,-	2.000.000,-
	3. Remtal	2	Smt.	900.000,-	1.800.000,-
	4. Korektor Midle 1&2	2	Smt.	3.000.000,-	6.000.000,-
3.	<i>Pelaksanaan Semester</i>				
	1. Panitia	2	Kali	800.000,-	1.600.000,-
	2. Soal Ma'arif 250 X 2 X 35.000,-	250	Siswa	70.000,-	17.500.000,-
	3. FC Daftar Hadir Pemberitahuan	2	Kali	250.000,-	500.000,-
	4. Trnsport Ambil Soal	2	Kali	200.000,-	400.000,-
	5. Korektor Smt. 1 & 2	2	Kali	3.500.000,-	7.000.000,-
	Pembuatan Soal Mulok	2	Kali	100.000,-	200.000,-
4.	<i>Pelaksanaan Ujian Akhir</i>				
	1. TRY OUT				
	a. Biaya Try Out 3x	41	Anak	30.000,-	1.230.000,-
	b. Pengawas	3	Guru	20.000,-	60.000,-
	2. UAMBN				
	a. Soal Kemenag	41	Anak	30.000,-	1.230.000,-
	b. Korektor	4	Mapel	25.000,-	100.000,-
	c. Konsumsi	4	Hari	30.000,-	120.000,-
	3. UAM NU				
	a. Soal Dari Ma'arif	41	Anak	50.000,-	2.050.000,-
	b. Korektor	19	Guru	20.000,-	380.000,-
	c. Konsumsi	6	Guru	15.000,-	90.000,-
	4. UJIAN PRAKTEK				
	a. Biaya Ujian Praktek	41	Anak	25.000,-	1.025.000,-
	b. Penguji	7	Guru	25.000,-	175.000,-
	c. Konsumsi	7	Guru	10.000,-	70.000,-
	5. UN				
	a. Pengawas	12	Guru	200.000,-	2.400.000,-
	b. Konsumsi	6	Hari	50.000,-	300.000,-
	6. Panitia				
	a. Penanggung Jawab	1	Kpl	400.000,-	400.000,-
	a. Ketua	1	Gr	400.000,-	400.000,-
	b. Sekertaris	1	Gr	400.000,-	400.000,-
	c. Bendahara	1	Gr	300.000,-	300.000,-
	d. Anggota	2	Gr	150.000,-	300.000,-
	7. Biaya Lain Lain				
	a. Vandel	41	Anak	60.000,-	2.460.000,-
	b. Legalisir	41	Anak	15.000,-	615.000,-
	c. Purna Siswa	41	Anak	50.000,-	2.050.000,-
	d. Penulis Ijasah	41	Siswa	15.000,-	615.000,-

Perhitungan Biaya Satuan Unit (*Unit Cost*)

	e. Jawa Pos	4	Hari	10.000,-	40.000,-
	a. Seragam Guru	21	Gr	250.000,-	5.250.000,-
	b. Bimbel	41	Siswa	20.000,-	820.000,-
	c. Rekreasi	41	Siswa	300.000,-	12.300.000,-
	d. Biaya Foto Kelas	41	Siswa	50.000,-	2.050.000,-
Total					80.110.000,-

3. Bidang Kesiswaan

Bidang kesiswaan dana yang dikeluarkan adalah sebesar Rp. 28.550.000,- dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 4
Rincian keuangan Bidang Kesiswaan

No	Pos Pengeluaran	Vol.	Satuan	Harga Satuan	Jumlah
1.	Panitia PSB	1	th	300.000,-	300.000,-
2.	Tutor MOS 6 x 25.000,-	6	ttr	30.000,-	180.000,-
3.	Siswa baru	50	siswa	40.000,-	2.000.000,-
4	Pelaksanaan ekstrakurikuler				3.150.000,-
	a. Khitobah	48	kali	25.000,-	1.200.000,-
	b. Pramuka	24	kali	50.000,-	1.200.000,-
	c. Olah raga	24	kali	25.000,-	600.000,-
	d. Pembinaan damping drumband	24	kali	50.000,-	1.200.000,-
	e. Pelatih drumband	24	kali	60.000,-	1.440.000,-
	f. Rias drumban	12	tampil	200.000,-	2.400.000,-
	g. Make up drumband + property	1	tahun	1.000.000,-	1.000.000,-
5.	Subsidi anak kurang mampu	8	siswa	360.000,-	2.880.000,-
6.	PHBN/PHBI	1	th	7.000.000,-	7.000.000,-
7.	Akomodasi mengikuti lomba	1	th	3.000.000,-	3.000.000,-
8.	Perawatan alat marching band	1	tahun	1.000.000,-	1.000.000,-
Sub total					28.550.000,-

4. Bidang Ketenagaan

Bidang ketenagaan dana yang dikeluarkan adalah sebesar Rp. 154.900.000,- dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5
Rincian Keuangan Bidang Ketenagaan

No	Pos Pengeluaran	Vol.	Satuan	Harga Satuan	Jumlah
1.	Pembayaran HR Guru Dan Karyawan	12	Bulan	11.000.000,-	132.000.000,-
2.	THR Guru Dan Karyawan	21	Guru	200.000,-	4.200.000,-
3.	Dana Peningkatan Kualitas Guru (Ziarah)	25	Guru	300.000,-	7.500.000,-
4.	Konsumsi Rutin 1	12	Bulan	600.000,-	7.200.000,-
5.	Administrasi Kepegawaian	1	Th	1.000.000,-	1.000.000,-
6.	Pengembangan Dan Peningkatan Pendidikan	1	Th	3.000.000,-	3.000.000,-
7	TPP	0	Th	3.000.000,-	0
Total					154.900.000,-

5. Bidang Sarana dan Prasarana

Bidang sarana dan prasarana dana yang dikeluarkan adalah sebesar Rp. 225.800.000,- dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 6.

Rincian Keuangan Bidang Sarana dan Prasarana

No	Pos Pengeluaran	Vol.	Satuan	Harga Satuan	Jumlah
1.	Penembahan Alat Olahraga	1	Th	2.000.000,-	2.000.000,-
2.	Perbaikan Gedung	1	Th	200.000.000,-	200.000.000,-
3.	Perlengkapan Kelas	12	Kelas	150.000,-	1.800.000,-
4.	Perwatan Sound	1	Th	2.000.000,-	2.000.000,-
5.	Pengecetan Sekolah Dan Rehab Ringan	1	Tahun	10.000.000,-	10.000.000,-
6.	Sarana Perpustakaan (Lemari)	1	Tahun	10.000.000,-	10.000.000,-
	Total				225.800.000,-

6. Bidang Hubungan Masyarakat

Bidang sarana dan prasarana dana yang dikeluarkan adalah sebesar Rp. 42.011.500,- dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 7.

Rincian Keuangan Bidang Hubungan Masyarakat

No.	Pos Pengeluaran	Vol.	Satuan	Harga Satuan	Jumlah
1.	Penyelenggaraan Rapat Wali Murid	2	Kl	2.000.000,-	4.000.000,-
2.	Perlengkapan Administrasi Supervisi	1	Kl	1.250.000,-	1.250.000,-
3.	Biaya Tak Terduga	1	Th	36.761.500,-	36.761.500,-
	Total				42.011.500,-

Jadi keseluruhan pengeluarannya adalah sebesar Rp 565.581.500,- dengan pendapatan sebesar Rp 568.581.500,- jadi bisa disimpulkan bahwa saldo MI Ma'arif Darul Ulum Brengkok tahun ajaran 2018/2019 adalah sebesar Rp. 3.000.000,-

Kesimpulan

Biaya (cost) yakni semua jenis pengeluaran yang berkenaan dengan penyelenggaraan pendidikan, baik dalam bentuk uang maupun barang dan tenaga (yang dapat dihargakan dengan uang) misalnya iuran siswa, sama pisik dan buku. Dalam konsep pembiayaan pendidikan dasar dan menengah, ada dua hal penting yang perlu dikaji atau dianalisis, yaitu pembiayaan pendidikan dari pemerintah, pemerrintah daerah dan masyarakat pada satuan pendidikan. Pendapatan yang diperoleh MI Ma'arif Darul Ulum Brengkok unuk satu tahun ajaran (2018/2019) adalah sebesar 568.581.500,- dan peneluarannya adalah sebesar Rp 565.581.500,-. Hal ini menjadikan saldo keuangan pendidikan di MI Ma'arif Darulu Ulum Brengkok adalah sebesar Rp. 3.000.000,-. Untuk SPP siswa diberi beban sebesar Rp 35.000,-. Tapi, dikarenakan sekolah mendapatkan dana BOS, maka untuk pembayaran SPP semua siswa adalah gratis.

Daftar Kepustakaan

- Fasrizal, Himyar. "Manajemen Pembiayaan Sekolah Dalam Meningkatkan Mutu Sekolah." *Jurnal al-Fikrah* Vo. 2 No. 1 (2014): 13.
- Fironika K., Rida. "Pembiayaan Pendidikan Di Indonesia." *Jurnal Ilmiah Pendidikan Dasar UNISSULA* Vol. 02 No. 1 (2015): 44.
- Hilfi, Lukman, Elsa Pudji Setiawati, Henni Djuhaeni, Sekar Ayu Paramita, and Ratna Komara. "Perbedaan Perhitungan Unit Cost Dengan Menggunakan Metode Activity Based Costing (ABC) Dan Metode Double Distribution (DD) Untuk Pasien Tb Paru Kategori 2 Di Instalasi Rawat Jalan Dan Rawat Inap Rumah Sakit Paru." *JSK* Volume 1 Nomor. 2 (Tahun 2015).
- Komariah, Nur. "Konsep Manajemen Keuangan Pendidikan." *Jurnal al-Afkar* Vol. 6 Nomor 1 (April 2018).
- Luh Kadek Supartini, Ni. "Analisis Satuan Biaya Pendidikan Di SMA Negeri 1 Sukawati Tahun Ajaran 2010/2011." *Jurnal Administrasi Pendidikan Indonesia* Vol. 3 No. 2 (2012).
- Maya Andreti, Ria. "Analisis Perhitungan Biaya Satuan (Unit Cost) Dengan Model Activity Based Costing (ABC) Di SMK Negeri 1 Wonosari." Skripsi, Universitas Negeri Yogyakarta, 2016.
- Mulyono. *Konsep Pembiayaan Pendidikan*. Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2010.
- Riatama, M. Findo. "Analisis Efisiensi Biaya Operasional Terhadap Profitabilitas Pada Perusahaan Sektor Makanan Dan Minuman Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia (BEI) Periode 2011-2014." Skripsi-, Universitas Lampung, 2017.
- Rusmana, Maman. "Sistem Pembiayaan Pendidikan Ditinjau Dari Efektivitas Dan Efisiensi Penyelenggaraan Pendidikan Pada Pemerintah Kabupaten Garut." *Jurnal Administrasi Pendidikan* Vol. 7 No. 1 (2018).
- Susilana, Rudi. *Modul Pembelajaran Metode Penelitian Kualitatif*. Badung: Jurusan Kurikulum dan Teknologi Pendidikan FIP UPI, 2012.
- Tri Handayani, Chatrin, and Sukirno. "Analisis Perhitungan Biaya Satuan (Unit Cost) Di Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Yogyakarta." *Jurnal Kajian Pendidikan Akuntansi Indonesia* Vol. 5 No. 1 (2016).
- Yulianisel. "Perhitungan Unit Cost Tindakan Bedah Appendektomi Di Kamar Operasi Rsd Madani Provinsi Sulawesi Tengah." *e-Jurnal Katalogis* Volume 3 Nomor 5 (May 2015): 170–180.
- Undang-Undang RI No. 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional Dan Penjelasannya*. Yogyakarta: Media Wacana Press, 2003.